

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI
SUMATERA UTARA

Parnasipan Simamora
NPP. 29.0155

*Asdaf Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Kebijakan Publik*

Email: Parnasipansimamora@gmail.com

ABSTRACT

Problem: Implementation of regional regulation policy number 6 of 2020 regarding tourism in Central Tapanuli Regency, North Sumatra Province. **Purpose:** This research is a qualitative research that aims to describe and analyze how the implementation of policies that regulate tourism according to regional regulations number 6 of 2020 in developing tourism objects in Central Tapanuli Regency so that tourism objects attract tourists and have a good impact on local governments and also the community around the tourist attraction. **Method:** This study uses qualitative methods and data collection using field observation techniques, open and in-depth interviews, documentation and withdrawal/verification. The results of the study stated, based on Edward III's theory, policy implementation had four and the results regarding the implementation of local government policy number 6 of 2020 regarding tourism in Central Tapanuli Regency, North Sumatra Province had been carried out well. **Result:** This can be seen from the many tourist areas in Central Tapanuli Regency and also the Central Tapanuli Regional Government which pays attention to tourism in Central Tapanuli Regency. Generally, the factors that hinder the implementation of local government policy number 6 of 2020 regarding tourism in Central Tapanuli Regency, North Sumatra, are related to the lack of supporting facilities and infrastructure around tourism in Central Tapanuli Regency, and still not using it. aspects of information technology in carrying out promotional and publication activities. **Conclusion :** Efforts made by the Tourism Office of Central Tapanuli Regency in overcoming the inhibiting factors, namely by equipping supporting facilities and infrastructure around tourist objects for the convenience of visiting tourists, promotion and tourism by utilizing information technology, conducting training or empowering apparatus resources as a driving force for object development. tourism and reinforce the main tasks and authorities of stakeholders.

Keywords : Tourism

ABSTRAK

Permasalahan: Implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 6 tahun 2020 tentang kepariwisataan di Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. **Tujuan:** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan yang mengatur tentang kepariwisataan sesuai peraturan daerah nomor 6 tahun 2020 dalam mengembangkan objek wisata yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah agar menjadi objek wisata yang menarik wisatawan dan membawa dampak yang baik bagi pemerintah daerah dan juga masyarakat di sekitar objek wisata. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi lapangan, wawancara terbuka dan mendalam, dokumentasi dan penarikan kesimpulan/verifikasi. **Hasil** penelitian menyatakan, berdasarkan teori Edward III implementasi kebijakan memiliki empat variabel dan hasil peneliti tentang implementasi

kebijakan pemerintah daerah nomor 6 tahun 2020 tentang kepariwisataan di Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sudah terlaksana cukup baik. **Kesimpulan:** Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya daerah wisata di Kabupaten Tapanuli Tengah dan juga Pemerintah Daerah Tapanuli Tengah memberikan perhatian kepada pariwisata yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Umumnya faktor yang menjadi penghambat pada implementasi kebijakan pemerintah daerah nomor 6 tahun 2020 tentang kepariwisataan di Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yaitu terkait dengan masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung di sekitar objek wisata di Kabupaten Tapanuli Tengah, serta pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah masih kurang memanfaatkan aspek teknologi informasi dalam melakukan kegiatan promosi dan publikasi. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah dalam mengatasi faktor penghambatnya, yaitu dengan melengkapi sarana dan prasarana pendukung di sekitar objek wisata untuk kenyamanan wisatawan yang berkunjung, meningkatkan promosi pariwisata dengan memanfaatkan teknologi informasi, melakukan pelatihan atau pemberdayaan sumber daya aparatur sebagai penggerak pengembangan objek wisata serta mempertegas tupoksi dan kewenangan para stakeholders.

Kata kunci : Kepariwisataan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata ialah suatu potensi yang sekarang ini sedang diteliti dan dikembangkan di banyak negara, ada kecenderungan yang berkembang dari pasar pariwisata global untuk berwisata ke daerah yang belum tercemar, kecenderungan ini memberikan kebebasan untuk kemajuan pariwisata Indonesia sebab Indonesia sebagai negara kepulauan yang paling besar didunia yang kaya akan keanekaragaman hayati, mempunyai garis pantai lebih dari 81.000 km dan 17.504 pulau, dimana terdapat pulau-pulau kecil yang berpotensi bila dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata seperti wisata bahari atau ekowisata (Qodriyatun, 2019).

Sektor pariwisata ialah kawasan yang berkembang pesat dan dipandang sebagai penunjang utama perekonomian. Potensi dan kekayaan alam yang ada harus dimanfaatkan dan diciptakan serta diharapkan dapat menjadi tujuan wisata yang memikat, daya tarik mendasar para wisatawan yang menginap di Indonesia mengingat keindahan alam dan kekayaan kebudayaan yang sangat layak untuk dijadikan sebagai objek wisata. Peraturan Daerah ini sebagai peraturan untuk mengatur tentang Kepariwisataan di Kabupaten Tapanuli Tengah, meskipun masih terdapat berbagai bagian sektor pariwisata sebagai kewajiban pemerintah pusat dalam mengelolanya, tetapi pembangunan dan pengembangan destinasi wisata menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah juga mengatur pada Perda Nomor 6 Tahun 2020 bagaimana Pemerintah mengembangkan pariwisata di Kabupaten Tapanuli Tengah dan juga mengatur tentang tujuan dan prinsip pada pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tapanuli Tengah, seperti pada pasal 2 ayat 1 Kepariwisataan di selenggarakan berdasarkan :

a.Mendorong.pertumbuhan.dan.produktivitas.ekonomi.daerah.untuk.

kepentingan.masyarakat.

b.Mengoptimalkan.pemanfaatan.sumber.daya.alam,.lingkungan,.dan.sumber.daya/manusia/de ngan.produk.budaya,dan/inovatif.untuk meningkatkan citra dan daya saing kawasan/dalam skala global.

c.Memperkuat.jati.diri./cinta tanah air, dan persatuan umat.sekaligus membangun persahabatan antar daerah dan bangsa. Pemerintah Daerah tentunya sudah melakukan pengembangan terhadap objek wisata yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, seperti dengan melakukan program-program pariwisata, tetapi jika ingin lebih mengembangkan objek wisata tentunya harus di dukung oleh infrastruktur pendukung yang memadai, akses jalan, ketersediaan fasilitas publik seperti wc dan lahan parkir. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena objek wisata yang ada jika dikembangkan dengan baik tentunya akan membawa dampak yang besar

bagi Pemerintah Daerah dan juga masyarakat sekitar. Berdasarkan dari uraian latar belakang penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana implementasi kebijakan yang mengatur tentang kepariwisataan sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2020 tersebut dalam mengembangkan objek wisata yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah agar menjadi objek wisata yang menarik wisatawan dan membawa dampak yang baik bagi Pemerintah Daerah dan juga masyarakat di sekitar objek wisata sehingga peneliti melaksanakan penelitian dengan judul: “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kepariwisata Di Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara”.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Terdapat 2 (dua) faktor penghambat dalam implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 6 tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya infrastruktur yang memadai di beberapa kawasan wisata.

Infrastruktur ini meliputi pembangunan jalan, penyediaan saluran air serta penerangan listrik. Dari hasil penelitian lapangan meskipun dikatakan bahwa sebagian besar infrastruktur di beberapa tempat wisata di Kabupaten Tapanuli Tengah masih kurang, namun ditemukan bahwa pembangunan jalan menuju lokasi beberapa obyek wisata dari pusat ibu kota hampir sudah dikatakan baik, sekitar 65% jalan menuju obyek wisata sudah beraspal sedangkan 35% lagi masih dalam pengerasan, namun dalam kondisi seperti itu wisatawan masih bisa mencapai lokasi obyek wisata. Sarana pendukung lainnya seperti toilet dan juga tempat sampah harus di perbanyak, kemudian penerangan listrik dan penyediaan saluran air harus di perhatikan lagi agar dapat memenuhi kebutuhan wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata di Kabupaten Tapanuli Tengah. Di era modern seperti sekarang ini, keberadaan objek wisata disuatu daerah merupakan sebuah tolak ukur maju atau tidaknya daerah tersebut. Namun, masalah sarana prasarana ini dapat menghalangi daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam mempromosikan potensi alamnya. Terkait faktor yang menghambat tata kelola pariwisata yaitu kurangnya sarana prasarana dan kebersihan objek wisata menjadi prioritas utama agar kegiatan wisata dapat bertahan, sehingga para wisatawan dan seluruh stakeholder yang terlibat dalam kegiatan wisata harus saling bersinergi menjaga lingkungan objek wisata.

2. Pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah belum maksimal dalam memanfaatkan aspek teknologi informasi dalam melakukan giat promosi dan publikasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam industri pariwisata di Kabupaten Tapanuli Tengah ternyata sangat mendukung dalam pengembangan pariwisata, khususnya dalam mempromosikan pariwisata. Pemanfaatan teknologi informasi sangat diperlukan untuk mengenalkan dan mempromosikan potensi-potensi wisata kepada masyarakat luas. Selain mengenalkan kepada masyarakat luas, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menarik investor-investor untuk berkontribusi aktif dalam usaha peningkatan pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah. Namun penggunaan teknologi informasi tersebut melalui website yang telah disediakan pemerintah daerah ternyata belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mempromosikan potensi pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah.

1.3 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu peneliti angkat dari Usman Munir & khudzaifah Dimiyati Absori (Munir et al., 2019) Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Di pulau Lombok penelitian ini adalah bersifat deskriptif, bermaksud memberikan gambaran tentang berbagai hal yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Arah kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang pariwisata di Pulau Lombok yakni pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan yang berpegang pada 4 pilar pariwisata, yaitu pengembangan destinasi, pemasaran pariwisata, industri dan kelembagaannya. Sehingga pemerintah daerah provinsi membuat sebuah program visit sumbawa Lombok, Frenly Lombok sebagai *branding*. Perbedaan dengan penelitian

sebelumnya adalah pada Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Dipulau lomboK, lebih fokus ke pengembangan pariwisata penelitian kedua yang peneliti ambil yaitu G. A. Krishti & A. Indraningsih (Kebijakan & Berbasis, 2020) Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kota Palu Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dengan *leading sector* Dinas kebudayaan dan pariwisata dan organisasi pelaksana lainnya yang diajak bekerja sama dan juga kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Palu merupakan Kebijakan pengembangan yang diintegrasikan dengan pembangunan infrastruktur, konsolidasi budaya, peningkatan kelestarian lingkungannya, serta kekuatan citra daerah. Pada penelitian sebelumnya yaitu Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kota Palu, lebih fokus ke bagaimana cara pengembangan pariwisata tersebut dengan penelitian ketiga yaitu Sri Nurhayati Qodriyatun (Qodriyatun, 2018) Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Karimunjawa Penelitian dilakukan di tahun 2018 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif Perkembangan Pariwisata di Karimunjawa berdasar ke arah pengembangan pariwisata dalam RPJMN 2005-2025 mengatakan perkembangan pariwisata dilaksanakan dengan memanfaatkan beraneka ragam keindahan alam sebagai wilayah wisata bahar yang paling luas di dunia secara tarif serta mendukung aktifitas perekonomian mengenai perkembangan budaya dan bangsa. Kemudian arah dari pembangunan ini dilaksanakan bersama-sama dengan pihak terkait yaitu Disporapar Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Jepara selaku pelaksana, dan Balai Taman Nasional Karimunjawa Kebijakan di Daerah Pada penelitian sebelumnya yaitu Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Karimunjawa, lebih berfokus bagaimana cara pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

1.4 Pernyataan kebaruan ilmiah

Peningkatan tenaga kerja melalui investasi yang masuk dan pembangunan infrastruktur yang akan mendorong peningkatan tersebut. Secara umum lapangan usaha yang dominan di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah Pertanian, Jasa dan Industri Pengolahan. Pada tahun 2020, lapangan usaha yang paling banyak mengalami peningkatan menyerap tenaga kerja di perusahaan swasta adalah sub sektor industri pengolahan. Masyarakat petani terdiri atas nelayan, petani yang menanam padi, horticultural dan ternak serta perkebunan rakyat. Lapangan usaha jasa yang dominan merupakan aktifitas perdagangan komoditi unggulan hasil pertanian dan produk kerajinan (industri rumah tangga), disamping jasa lainnya seperti pengangkutan, komunikasi dan perbankan (lembaga keuangan). Industri pengolahan meliputi industri yang berbasis hasil perikanan tangkap dan perkebunan.

1.5 Tujuan

Impelentasi Kebijakan Pemerintah Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kepariwisataan pada pasal Kepariwisataan pada pasal 2 ayat 1 disebutkan kepariwisataan diselenggarakan dengan tujuan: mendorong pertumbuhan dan produktifitas ekonomi daerah untuk menyejahterakan masyarakat, jadi masyarakat merupakan merupakan faktor yang sangat penting.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif sehingga peneliti dapat menggambarkan secara akurat mengenai fakta yang berada dilapangan sesuai dengan deskripsi penelitian dan melalui hasil metode pengumpulan data yang berupa wawancara, obserfasi dan dokumentasi Kemudian Dalam Penentuan Informan Peneliti Menggunakan Teknik Purposive Sampling dan snow ball sampling dimana nantinya peneliti sudah menentukan siapa informan yang di anggap mampu menyediakan data dan yang berhubungan dengan data dan jika diperlukan lagi maka informan akan ditambah sesuai dengan

data yang dibutuhkan untuk penelitian. Dalam penelitian tersebut meneliti membutuhkan 4 informan diantaranya ialah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah, Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah, Masyarakat Dan Wisatawan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Impelentasi Kebijakan Pemerintah Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kepariwisataan Kabupaten Tapanuli Tengah

Impelentasi Kebijakan Pemerintah Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kepariwisataan Kabupaten Tapanuli Tengah yang dilakukan oleh penulis dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, dimana kebijakan telah dapat dikatakan mencapai suatu keberhasilan dengan memperhatikan beberapa faktor diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Maka penulis akan mendeskripsikan hasil analisis yang telah dilakukan di lapangan dan membandingkannya dengan teori implementasi kebijakan Edward III. Kebijakan pengembangan pariwisata adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam dan budaya yang menjadi andalan untuk meningkatkan pembangunan perekonomian/sebagai salah satu unsur penguatan/ekonomi masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah. 1. Komunikasi Edward III menjelaskan bahwa komunikasi dalam implementasi dipengaruhi beberapa indikator yaitu transformasi informasi (transmisi), kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi informasi (consistency). 2. Sumber Daya Edward III menjelaskan bahwa sumber daya dalam implementasi dipengaruhi beberapa indikator yaitu Dukungan Sumber Daya Manusia dan Dukungan Sumber Daya Anggaran. 3. Disposisi (Sikap Pelaksana) Edward III menjelaskan bahwa disposisi (sikap pelaksana) dalam implementasi dipengaruhi dua indikator yaitu rekrutmen pengurus atau pengangkatan birokrat dan insentif. 4. Struktur Birokrasi Edward III menjelaskan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi dipengaruhi dua indikator yaitu fragmentasi dan standard operating procedures (sop).

3.2 Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020

Terdapat 2 (dua) faktor penghambat dalam implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 6 tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya infrastruktur yang memadai di beberapa kawasan wisata.

Infrastruktur ini meliputi pembangunan jalan, penyediaan saluran air serta penerangan listrik. Dari hasil penelitian di lapangan meskipun dikatakan bahwa sebagian besar infrastruktur di beberapa tempat wisata di Kabupaten Tapanuli Tengah masih kurang, namun ditemukan bahwa pembangunan jalan menuju lokasi beberapa obyek wisata dari pusat ibu kota hampir sudah dikatakan baik, sekitar 65% jalan menuju obyek wisata sudah beraspal sedangkan 35% lagi masih dalam pengerasan, namun dalam kondisi seperti itu wisatawan masih bisa mencapai lokasi obyek wisata. Sarana pendukung lainnya seperti toilet dan juga tempat sampah harus di perbanyak, kemudian penerangan listrik dan penyediaan saluran air harus di perhatikan lagi agar dapat memenuhi kebutuhan wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata di Kabupaten Tapanuli Tengah. Di era modern seperti sekarang ini, keberadaan objek wisata di suatu daerah merupakan sebuah tolak ukur maju atau tidaknya daerah tersebut. Namun, masalah sarana prasarana ini dapat menghalangi daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam mempromosikan potensi alamnya.

Terkait faktor yang menghambat tata kelola pariwisata yaitu kurangnya sarana prasarana dan kebersihan objek wisata menjadi prioritas utama agar kegiatan wisata dapat bertahan, sehingga para wisatawan dan seluruh stakeholder yang terlibat dalam kegiatan wisata harus saling bersinergi menjaga lingkungan objek wisata.

2. Pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah belum maksimal dalam memanfaatkan aspek teknologi informasi dalam melakukan giat promosi dan publikasi. Pemanfaatan

teknologi informasi dalam industri pariwisata di Kabupaten Tapanuli Tengah ternyata sangat mendukung dalam pengembangan pariwisata, khususnya dalam mempromosikan pariwisata. Pemanfaatan teknologi informasi sangat diperlukan untuk mengenalkan dan mempromosikan potensi-potensi wisata kepada masyarakat luas. Selain mengenalkan kepada masyarakat luas, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menarik investor-investor untuk berkontribusi aktif dalam usaha peningkatan pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah. Namun penggunaan teknologi informasi tersebut melalui website yang telah disediakan pemerintah daerah ternyata belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mempromosikan potensi pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah. Hal tersebut terbukti dengan belum adanya pembaharuan informasi dan kurang adanya gambaran secara riil tentang potensi wisata Kabupaten Tapanuli Tengah yang digambarkan. Jadi peningkatan penggunaan teknologi informasi dari segi kualitas maupun kuantitas untuk usaha pengembangan pariwisata di Kabupaten Tapanuli Tengah masih perlu ditingkatkan. Selain itu jika diperhatikan belum terdapat sistem promosi yang menarik seperti menggunakan spanduk, baliho atau media promosi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Tapanuli Tengah ini menyebabkan pariwisata di Kabupaten Tapanuli Tengah belum dikenal di masyarakat luas. Masih kurangnya promosi objek wisata di Kawasan Tapanuli tengah ini disebabkan pemerintah belum menempatkan pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan sehingga dana yang dianggarkan masih belum mencukupi untuk mengembangkan produk-produk wisata yang ada. Padahal pemasaran atau promosi dan inovasi kegiatan-kegiatan pariwisata penting untuk dilakukan karena hal tersebut dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung sehingga pada akhirnya memberikan dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat yang juga berpengaruh pada pembangunan infrastruktur daerah. Dalam promosi dan inovasi pariwisata harus didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang menarik dalam obyek wisata, sehingga mampu mempengaruhi pengunjung untuk datang.

3.3 Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Faktor Penghambat

Upaya merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dialami Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah dalam mengembangkan objek wisata yang ada di kawasan ini. Sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan maksimal dan mendapatkan hasil yang maksimal juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar maupun Kabupaten Tapanuli Tengah. Adapun upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu sebagai berikut: 1. Peningkatan sarana prasana pendukung dengan meningkatkan sarana prasara yang ada dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk datang berkunjung ke tapanuli tengah, karena sarana prasarana yang baik merupakan sebuah syarat sebuah objek wisata agar dapat memenuhi kebutuhan wisatawan. Meningkatkan promosi pariwisata melalui teknologi informasi. Letak geografis Kabupaten Tapanuli Tengah yang berada tepat di pesisir pantai merupakan letak yang cukup strategis yang dapat mempermudah masuknya wisatawan ke Kabupaten Tapanuli Tengah. Selain itu letak Kabupaten Tapanuli Tengah yang berada di sekitaran pesisir pantai juga dapat mempunyai dampak positif terhadap promosi yang dapat dilakukan untuk mengenalkan objek-objek wisata Kabupaten Tapanuli Tengah. Upaya tersebut dapat dilakukan seperti memasang iklan di media elektronik yang banyak digunakan masyarakat, dan membuat blog khusus daerah wisata di yang ada di Tapanuli Tengah. Kegiatan promosi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sosial media, yang dimana pemerintah dapat membuat info-info penting mengenai pariwisata.

3.4 Diskusi temuan utama penelitian

Daya tarik wisatawan tentunya di didukung oleh kebersihan lingkungan objek wisata, semakin bersih lingkungan objek wisata tentunya menarik lebih banyak wisatawan yang berkunjung dan Kembali lagi berkunjung jika merasa nyaman dengan lingkungan sekitar yang bersih, menurut observasi penulis kondisi lingkungan di daerah wisata yang di Kabupaten Tapanuli Tengah sudah baik namun masih ada saja hal yang perlu di tingkatkan, baik itu dari kesadaran

dari masyarakat khususnya pengunjung untuk dapat menjaga kondisi lingkungan agar dapat tetap dalam kondisi yang baik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2020 mengatur tentang kepariwisataan di Kabupaten Tapanuli Tengah sudah terlaksana cukup baik. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya daerah wisata di Kabupaten Tapanuli Tengah dan juga Pemerintah Tapanuli Tengah memberikan perhatian kepada pariwisata yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Namun masih terdapat kekurangan dalam implementasi kebijakan peraturan daerah tersebut, dimana sarana prasarana pendukung dapat mejadi perhatian lebih oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah. Meskipun di lapangan akses jalan pendukung sudah baik, hal ini di tandai dengan 65% jalan menuju objek wisata telah aspal, tetapi sebagai daerah dengan potensi alam yang sangat bagus tentunya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah harus memperhatikan hal-hal kecil seperti sarana prasarana pendukung, contohnya seperti: kamar mandi dan tempat sampah yang sudah ada dapat di tambah lagi. Faktor ini menjadi penting karena wisatawan akan datang kembali ke objek wisata di Tapanuli Tengah jika mereka puas dengan sarana prasarana yang ada. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah dalam memaksimalkan implementasi kebijakan kepariwisataan, seperti Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki potensi daerah yang bagus dan memiliki beberapa potensi wisata unggulan. Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki potensi kebudayaan yang khususnya dalam konteks pariwisata, baik itu potensi alam sebagai suatu anugrah maupun potensi budaya yang berhasil diciptakan melalui tangan-tangan terampil. Adapun faktor yang menjadi penghambat Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah dalam memaksimalkan implementasi kebijakan kepariwisataan, seperti masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung di sekitar objek wisata di Kabupaten Tapanuli Tengah, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah masih kurang memanfaatkan aspek teknologi informasi dalam melakukan kegiatan promosi dan publikasi.

2. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah dalam mengatasi faktor penghambatnya, yaitu dengan melengkapi sarana dan prasarana pendukung di sekitar objek wisata untuk kenyamanan wisatawan yang berkunjung dan meningkatkan promosi pariwisata dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Keterbatasan penelitian. tersebut kami akan mencoba melakukan terobosan baru dan melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan objek wisata ini. Terkait dengan anggaran kami akan menyusun kembali rancangan anggaran untuk tahun selanjutnya sehingga pengembangan berupa pembangunan infrastruktur nanti dapat terselesaikan dengan maksimal termasuk jalan yang belum selesai 100 persen

Arah masa depan penelitian. Hal ini dicapai melalui pelaksanaan rencana pengembangan pariwisata, dengan memperhatikan keanekaragaman budaya dan alam, keunikan, keunikan dan kebutuhan manusia untuk pariwisata. Pengembangan pariwisata itu sendiri adalah upaya untuk membuat dan menggunakan objek serta daya tarik wisata seperti wisata alam, berbagai tanaman hijau, sebagian besar adat istiadat dan kebudayat dan warisan bersejarah. Inilah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan dan keadaan alam, flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah dan seni budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia merupakan aset dan modal luar biasa untuk memajukan dan meningkatkan kepariwisataan.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih diutarakan kepada SKPD yang terkait dalam pengumpulan penelitian saya dan juga sodara kabupaten saya yang telah membantu saya dalam memberi semangat untuk menyelesaikan penelitian saya tersebut.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku, Jurnal, Skripsi

- Indraningsih, G. K. A. (2020). Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kota Palu. *Jurnal Pariwisata PaRAMA: Panorama, Recreation, Accomodation, Merchandise, Accessibility*, 1(1), 31-40.
- Kebijakan, I., & Berbasis, P. (2019). *Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kota Palu Implementation Of Tourism Development Policy Palu City*. 1, 31–41.
- Kebijakan, I., Objek, P., Sorake, P., Kabupaten, D. I., & Selatan, N. (2019). *Skripsi Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Oleh : Samuel Berkat Putra Duha*.
- Munir, U., Dimiyati, K., & Absori, A. (2019). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Pulau Lombok. *Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(2), 128–137. <https://doi.org/10.33319/Yume.V4i2.13>
- Putra Duha, S. Berkat. (2019). No Title. *Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Pariwisata Di Pantai Sorake Kabupaten Nias Selatan*.
- Qodriyatun, S. N. (2019). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Karimunjawa. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(2), 240–259. <https://doi.org/10.46807/Aspirasi.V9i2.1110>
- Satori Dan Komariah, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*. Medpress.

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kepariwisata
4. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2025
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kepariwisata
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

C. Sumber Lain

1. <https://www.slideshare.net/JabalanPerang/kebijakan-pengembangan-pariwisata> diakses 09 Januari 2015

2. <https://tapanulitengahkab.bps.go.id/> (2021)

